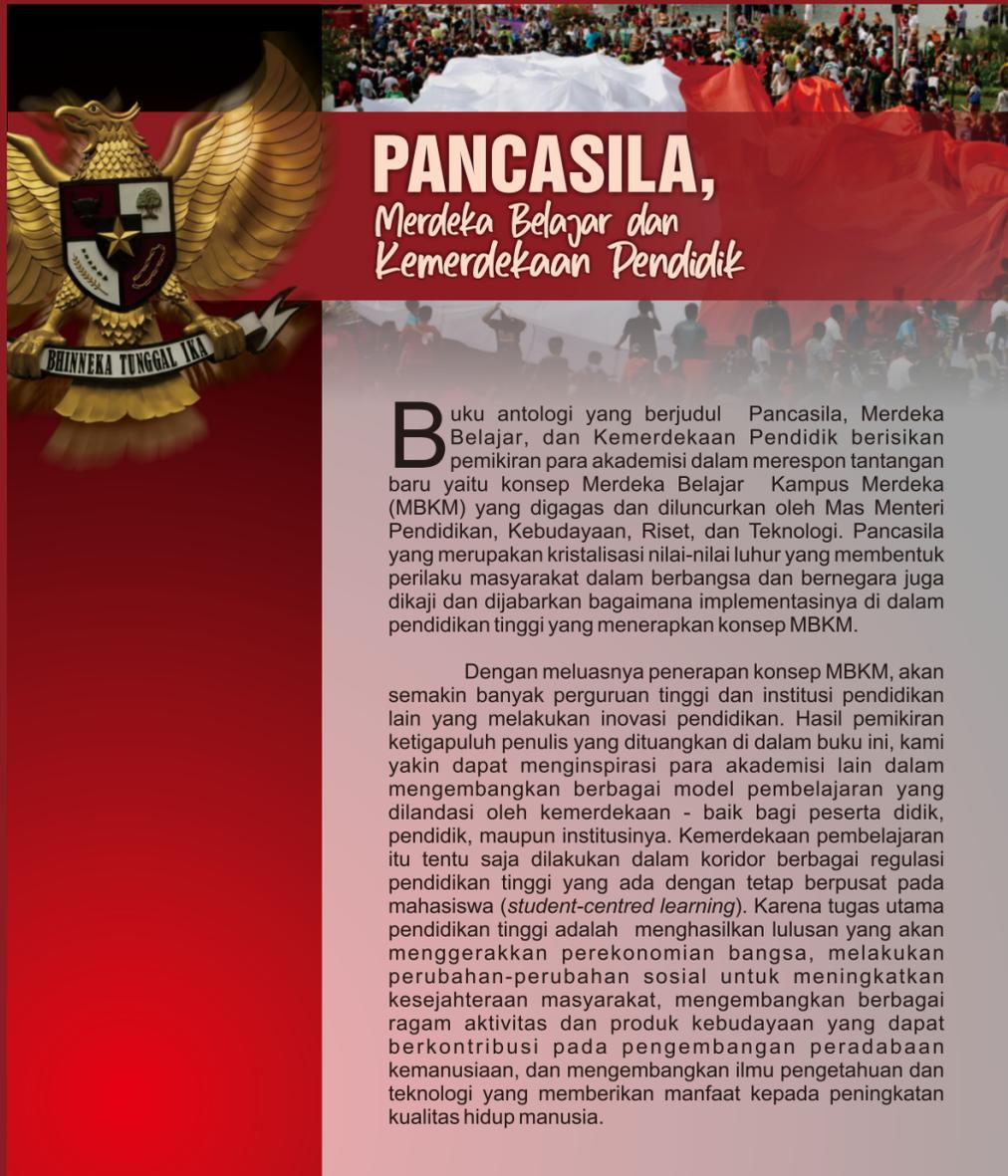


# PANCASILA, Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik



# PANCASILA, Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik

Buku antologi yang berjudul Pancasila, Merdeka Belajar, dan Kemerdekaan Pendidik berisikan pemikiran para akademisi dalam merespon tantangan baru yaitu konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas dan diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang membentuk perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara juga dikaji dan dijabarkan bagaimana implementasinya di dalam pendidikan tinggi yang menerapkan konsep MBKM.

Dengan meluasnya penerapan konsep MBKM, akan semakin banyak perguruan tinggi dan institusi pendidikan lain yang melakukan inovasi pendidikan. Hasil pemikiran ketigapuluh penulis yang dituangkan di dalam buku ini, kami yakin dapat menginspirasi para akademisi lain dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang dilandasi oleh kemerdekaan - baik bagi peserta didik, pendidik, maupun institusinya. Kemerdekaan pembelajaran itu tentu saja dilakukan dalam koridor berbagai regulasi pendidikan tinggi yang ada dengan tetap berpusat pada mahasiswa (*student-centred learning*). Karena tugas utama pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang akan menggerakkan perekonomian bangsa, melakukan perubahan-perubahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan berbagai ragam aktivitas dan produk kebudayaan yang dapat berkontribusi pada pengembangan peradaban kemanusiaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas hidup manusia.



Gedung Umar bin Khattab Kantor Pusat LT. 3,  
Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144  
Telp. 0341-551932  
unismapress@unisma.ac.id

PENDIDIKAN

ISBN 978-623-99161-0-7



9 786239 916107

Harga P. Jawa  
Rp. 63.000

PANCASILA, MERDEKA BELAJAR DAN KEMERDEKAAN PENDIDIK



Kata Pengantar  
Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.  
(Rektor Universitas Gadjah Mada  
Ketua Forum Rektor Indonesia 2021-2022)



# PANCASILA, Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik

Marinda Sari Sofiyana | Supriyono | Madya Ahdiyati | Herman | Abdul Malik Iskandar | Andiyani | Nanis Hairunisya | Lailatul Usriyah | Lukas Dwiantara | Betty Ariani | Firda Aulia Izzati | Endang Muryani | Bambang Panji Gunawan | Nur Aida | Hairuddin K | Muchamad Taufiq | Sita Acetylena | Rumsari Hadi Sumarto | Asri Widiatsih | Tining Haryanti | La Selo | Sulistyani Eka Lestari | Endang Tri Wahyurini | Minto Santoso | Indrati Rini | Harry Yulianto | Puji Asmaul Chusna | Endang Fatmawati | Jamila Lestyowati | Diah Puji Nali Brata | Ifdlolul Maghfur | Wiwik Heny Winarsih | Mustika Dewi | Siti Marwiyah | Hasanah | Mahmud | Karwanto | M. Daimul Abror | Agung Purnomo | Titi Savitri Prihatiningsih





# **PANCASILA**

## **Merdeka Belajar Dan Kemerdekaan Pendidik**



Marinda Sari Sofiyana, Supriyono, Madya Ahdiyat, Herman, Abdul Malik Iskandar, Andiyan, Nanis Hairunisya, Lailatul Usriyah, Lukas Dwiantara, Betty Ariani, Firda Aulia Izzati, Endang Muryani, Bambang Panji Gunawan, Nur Aida, Hairuddin K, Muchamad Taufiq, Sita Acetylena, Rumsari Hadi Sumarto, Asri Widiatsih, Tining Haryanti, La Selo, Sulistyani Eka Lestari, Endang Tri Wahyurini, Minto Santoso, Indrati Rini, Harry Yulianto, Puji Asmaul Chusna, Endang Fatmawati, Jamila Lestyowati, Diah Puji Nali Brata, Ifdlolul Maghfur, Wiwik Heny Winarsih, Mustika Dewi, Siti Marwiyah, Hasanah, Mahmud, Karwanto, M. Daimul Abror, Agung Purnomo, Titi Savitri Prihatiningsih

# PANCASILA

## Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik

### Author:

Marinda Sari Sofiyana, Supriyono, Madya Ahdiyati, Herman, Abdul Malik Iskandar, Andiyan, Nanis Hairunisya, Lailatul Usriyah, Lukas Dwiantara, Betty Ariani, Firda Aulia Izzati, Endang Muryani, Bambang Panji Gunawan, Nur Aida, Hairuddin K, Muchamad Taufiq, Sita Acetylena, Rumsari Hadi Sumarto, Asri Widiatsih, Tining Haryanti, La Selo, Sulistyani Eka Lestari, Endang Tri Wahyurini, Minto Santoso, Indrati Rini, Harry Yulianto, Puji Asmaul Chusna, Endang Fatmawati, Jamila Lestyowati, Diah Puji Nali Brata, Ifdlolul Maghfur, Wiwik Heny Winarsih, Mustika Dewi, Siti Marwiyah, Hasanah, Mahmud, Karwanto, M. Daimul Abror, Agung Purnomo, Titi Savitri Prihatiningsih

### Layouter:

**Hery Suro**

### Editor:

**Dr. Hayat, S.A.P., M.Si., CIQaR**

### Design Cover:

**Hery Suro**

copyright © 2021

### Penerbit



Unisma Press  
Gedung Umar bin Khattab Kantor Pusat LT. 3,  
Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144  
Telp. 0341-551932 ext 232  
unismapress@unisma.ac.id

Cetakan Pertama : Desember 2021  
Ukuran : 15,5 cm x 23 cm  
Jumlah Halaman : 222 halaman

**Anggota IKAPI No.303/JTI/2021**

**ISBN: 978-623-99161-0-7**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

# KATA PENGANTAR

**Rektor Universitas Gadjah Mada  
Ketua Forum Rektor Indonesia 2021-2022**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, serta dengan kesehatan yang dianugerahkan, maka kita semua dapat melakukan tugas-tugas sebagai akademisi dengan sebaik-baiknya. Selaku Rektor Universitas Gadjah Mada kami mengucapkan selamat kepada ketiga puluh penulis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang telah menyelesaikan sebuah karya berupa buku antologi yang berjudul **Pancasila, Merdeka Belajar, dan Kemerdekaan Pendidik**. Buku ini berisikan pemikiran para akademisi dalam merespon tantangan baru yaitu konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas dan diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang membentuk perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara juga dikaji dan dijabarkan bagaimana implementasinya di dalam pendidikan tinggi yang menerapkan konsep MBKM.

Dengan meluasnya penerapan konsep MBKM, akan semakin banyak perguruan tinggi dan institusi pendidikan lain yang melakukan inovasi pendidikan. Hasil pemikiran ketigapuluh penulis yang dituangkan di dalam buku ini, kami yakin, dapat menginspirasi para akademisi lain dalam

mengembangkan berbagai model pembelajaran yang dilandasi oleh kemerdekaan – baik bagi peserta didik, pendidik, maupun institusinya. Kemerdekaan pembelajaran itu tentu saja dilakukan dalam koridor berbagai regulasi pendidikan tinggi yang ada dengan tetap berpusat pada mahasiswa (*student-centred learning*). Karena tugas utama pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang akan menggerakkan perekonomian bangsa, melakukan perubahan-perubahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan berbagai ragam aktivitas dan produk kebudayaan yang dapat berkontribusi pada pengembangan peradaban kemanusiaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas hidup manusia.

Akhir kata, UGM sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan akan selalu mendukung upaya-upaya pencerdasan kehidupan bangsa dalam berbagai bentuk publikasi. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UNISMA Press dan segenap dewan redaksi yang telah bersedia untuk memfasilitasi proses penulisan buku ini dan melakukan penerbitan sehingga buku ini dapat diakses oleh kalangan akademisi dan masyarakat umum secara luas. Semoga upaya ketigapuluh penulis ini akan diikuti pula dengan berbagai karya publikasi dari para akademisi di seluruh Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

30 November 2021

---

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU,  
ASEAN Eng.Rektor Universitas Gadjah Mada  
Ketua Forum Rektor Indonesia 2021-2022

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii

### BAGIAN I

Peran Pendidik dalam Mewujudkan Merdeka Belajar Pelajar Pancasila ..... <b>Marinda Sari Sofiyana</b>	1
Ruh Pancasila dalam Arah Gerak Pendidikan Tinggi Di Indonesia ..... <b>Betty Ariani</b>	5
Relevansi Pancasila Dan Globalisasi Bagi Generasi Muda ..... <b>Firda Aulia Izzati</b>	10
Pancasila Spirit Kesuksesan Adaptasi Teknologi dalam MBKM ..... <b>Tining Haryanti</b>	15
Eksistensi Pancasila Sebagai Moral Force Dalam Merdeka Belajar ..... Di Perguruan Tinggi <b>Muchamad Taufiq</b>	21
Membangkitkan Mahasiswa Menjadi Pancasila-lis Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ..... <b>Rumsari Hadi Sumartono</b>	29
Membangun Karakter Bangsa Berdasarkan Pancasila Melalui Perpustakaan ..... <b>Endang Fatmawati</b>	34
Peran Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila ..... <b>Karwanto</b>	42

## **BAGIAN II**

Memaknai Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila .....	50
<b>Herman</b>	
Adaptasi Kurikulum Arsitektur Terhadap Kebijakan MBKM .....	55
<b>Andiyan</b>	
Mengaktualisasi Pancasila Dengan Membangun Komunitas Inklusif Di Kalangan Generasi Muda .....	60
<b>Lukas Dwiantara</b>	
Batasan Nilai-nilai Pancasila Dalam Merdeka Belajar Di Kampus merdeka ..	64
<b>Bambang Panji Gunawan</b>	
Pancasila, Kesejahteraan dan Pendidikan Karakter .....	70
<b>Nur Aida</b>	
Nilai Kearifan local Bersesuaian Dengan Landasan Aksiologis Filsafat Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Karakter Dalam Merdeka Belajar .....	75
<b>Asri Widiatsih</b>	
Bahasa Indonesia Dan Persatuan : Quo Vadis Sumpah Pemuda .....	80
<b>Jamila lestyowati</b>	
Merdeka Belajar Dalam Pengelolaan Plasma Nutfah Sumber Pangan Berkelanjutan .....	86
<b>Wiwik Heny Winarsih</b>	
Power Of Spiritual Pancasila .....	91
<b>Ifdlolul Maghfur</b>	
Kewirausahaan Berlandaskan nilai-nilai Pancasila .....	96
<b>Agung Purnomo</b>	

## **BAGIAN III**

Pancasila Dari Dalam Ruang Ruang Pembelajaran .....	100
<b>Madya Ahdiyati</b>	

Manajemen Instruksional Masyarakat Kelas Pelajar Pancasila .....	106
<b>Supriyono</b>	
Merdeka Belajar program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER .....	114
<b>Lailatul Usriyah</b>	
Merdeka Belajar Di Kampus Merdeka Berdasarkan Pancasila .....	119
<b>Endang Muryani</b>	
Merdeka Belajar dan Tantangannya .....	127
<b>Hairuddin K</b>	
Merdeka Belajar Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan .....	132
<b>Endang Tri Wahyurini</b>	
Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi Di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	137
<b>Diah Puji Nali Brata</b>	
Pancasila Merangkai merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik Mewujudkan Keunggulan .....	142
<b>La Selo</b>	
Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Dalam Proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	147
<b>Indrati Rini</b>	
Dengan Semangat Pancasila Kita Majukan Pendidikan Profesi Bidan Di Indonesia .....	152
<b>Mustika Dewi</b>	
Pancasila Untuk” Kemerdekaan Edukasi” Berbasis Ketuhanan, Keadilan Dan Kemanusiaan .....	158
<b>Siti Marwiyah</b>	
Relevansi Pancasila dan Kitab Ta’limul Muta’lim Dalam mewujudkan Merdeka Belajar.....	165
<b>Khasanah</b>	

Merdeka Belajar untuk Pendidikan Profesi Kesehatan : Menyongsong Era Kenormalan Baru .....	170
<b>Titi Savitri Prihatiningsih</b>	

#### **BAGIAN IV**

Merdeka Belajar Dalam konteks era Mendikbud Ki Hadjar Dewantara dan Nadiem Makarim .....	176
<b>Abdul Malik Iskandar</b>	

Merdeka Belajar berbasis Pancasila Di Era Society 5.0 .....	181
<b>Nanis Hairunisya</b>	

Pendidikan Merdeka Ki Hadjar Dewantara Sebagai Jalan membumikan Pancasila .....	184
<b>Sita Acetylena</b>	

Pentingnya penanaman Karakter usia Sekolah Dasar Untuk mensukseskan Merdeka Belajar .....	189
<b>Puji Asmaul Chusna</b>	

Digitalisasi pendidikan (tantangan dan peluang mewujudkan pelajar Pancasila) .....	194
<b>Minto Santoso</b>	

Pancasila Sebagai Fundamental Pembangunan Karakter Bangsa .....	199
<b>Harry Yulianto</b>	

Pancasila, Sumber Kekuatan Filosofis Edukatif Yang Mewujudkan Era Pencerahan .....	204
<b>Sulistiyani Eka Lestari</b>	

Penguatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Merdeka Belajar .....	211
<b>Mahmud</b>	

Pancasila, Pesantren dan Nasionalisme: Konsep <i>Mur-Baut</i> Dalam Mencetak Santri-Mahasiswa berkarakter Religius-Nasionalis .....	217
<b>M. Daimul Abror</b>	

# **PANCASILA UNTUK "KEMERDEKAAAN EDUKASI" BERBASIS KETUHANAN, KEADILAN DAN KEMANUSIAAN**

Oleh: Siti Marwiyah  
Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Ad astra per aspera* atau Mencapai bintang melalui pengorbanan

## **Pendahuluan**

Kata mutiara itu menunjukkan, bangsa manapun di muka bumi ini, jika ingin mencapai bintang atau kejayaan haruslah berani dan rela berkorban.

Segala aktifitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini harus berpijak pada ideologi bangsa, yakni Pancasila. Dari Pancasila inilah, setiap subyek bangsa diwajibkan atau diharuskan meluruskan pikiran, sikap dan perilakunya yang benar atau perilaku yang tidak mendatangkan kesulitan dan penderitaan bagi lainnya, dan sebaliknya mendatangkan kebahagiaannya.

Kalau manusia negeri ini terjerumus dalam perilaku yang mendehumanisasikan diri dan sesamanya, maka ini berarti dalam dirinya kehilangan "kemerdekaan edukasi". Kemampuan atau kemampuannya untuk mendidik diri menjadi pemerdeka tidak ditunjukkannya. Disinilah dirinya layak disebut sebagai manusia yang kehilangan Pancasila, yang mengakibatkan memperoleh "kemerdekaan edukasi". Sehingga kemana-mana atau dimana-mana tampak tidak menampilkan perilaku berbasis ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan.

Dalam ranah itu, terbaca bahwa manusia yang memilih jalan berseberangan dengan ideologi atau kurang menjiwai Pancasila masih sangat banyak, yang mengesankan kalau mereka belum totalitas "meng-Indonesia". Semestinya, Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke

dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya.<sup>12</sup>

Landasan kuat secara ideologis yang idealitasnya menjadi “kiblat”, bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia secara istimewa yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketika di masyarakat masih banyak kondisi buruk atau tidak mencerminkan diri sebagai subyek yang merdeka secara edukatif, maka diantara yang perlu dipertanyakan adalah ketaatan ideologisnya

## Pembahasan

Dalam ranah teoritis, setiap subyek bangsa sebenarnya diajari, bahwa pembentukan sumber nilai yang mawadahi sumber sistem falsafah kebangsaan berjalan dalam sejarah panjang yang melibatkan kaum cendekia dan benar-benar *primus inter pares*, di samping masyarakat. Proses yang demikian panjang ini menjadi tidak sia-sia atau tidak sampai kehilangan makna karena dogma yang terkandung dalam Pancasila berisikan tentang ajaran kemuliaan dan memuliakan hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, seperti bagaimana menjadi manusia yang mampu “memanusiakan manusia” atau membuat “Tuhan selalu hidup setiap aktifitas manusia”, sehingga diidealisasikan manusia tetap berjalan di jalan yang benar. Dalam ranah demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik,<sup>13</sup> yang membuat manusia mengabdikan pada kebaikan.

Menurut Teguh Prasetyo bahwa Pancasila mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif.<sup>14</sup> dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *philosophische grondslag (grundnorm)* maka pembentukan hukum, penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Disamping itu posisi yang demikian telah menjadikan Pancasila sebagai dasar dari sistem hukum bangsa Indonesia yang mencakup 4 hal yaitu, *philosophical, political, cultural, dan sociological*.

---

<sup>12</sup> Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). 243.

<sup>13</sup> Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKN*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 23, dan lihat Ari Tri Soegiti, dkk, *Pendidikan Pancasila*, (Semarang: Unnes Press, 2016), 2.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi, *Membangun Hukum Berdasar Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2014). 36,

Kita memang harus terus belajar banyak. Misalnya dari Sunan Drajat, dalam episode perjuangannya telah memformulasikan resep kecerdasan sosial yang sejatinya berensi doktrin ideologi Pancasila. Resepnya ini dijadikan ruh dalam aktivitas dakwahnya dengan ungkapan sederhana seperti *"berilah tongkat kepada orang buta; berilah pakaian kepada orang yang telanjang; berilah makan kepada orang yang kelaparan; dan berilah perlindungan kepada orang yang kehujanan"*.

Konstruksi keteladanan moral spiritual yang bertajuk resep kecerdasan sosial itu ditujukan bukan semata pada "peziarah pluralistik" lokal yang mengunjunginya, tetapi juga elemen elit negara tentang makna kehidupan sebagai individu dan pemegang amanat publik berbasis menghidupkan atau membangkitkan ruh Pancasila.

Jika kita baca dengan kebeningan hati, dalam resep Sunan Drajat itu, elit negara mempunyai tanggungjawab besar untuk membuktikan perannya sebagai pengamal dan pembumi utama Pancasila. Masalahnya, apakah mungkin mereka bisa menegakkan resep itu kalau mereka disibukkan mengkhianati dan mendistorsi Pancasila, atau tergelincir jadi "teroris" yang men destruksi makna agung Pancasila?

Cendekiawan muslim Azzumardi Azra (2010) yang pernah mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris atas prestasinya dalam pencerahan pluralisme melontarkan gugatan, bagaimana kita bisa berbicara tentang "Ketuhanan Yang Maha Esa" ketika dalam berketuhanan terdapat fakta adanya sebagian warga yang dari waktu ke waktu memaksakan kemauannya sendiri atas nama Tuhan. Bagaimana kita bicara tentang "kemanusiaan yang adil dan beradab" ketika warga dari satu tempat ke tempat lain, karena sebab-sebab yang sepele, sangat mudah mengamuk, menghancurkan harta benda, dan mencabut nyawa.

Bagaimana pula kita sanggup berbicara tentang "persatuan Indonesia" ketika banyak orang dan kelompok lebih mementingkan diri dan kelompoknya melalui tindakan melanggar hukum seperti korupsi dan mengorbankan solidaritas terhadap warga lainnya, atau Kemana-mana suka men destruksi hak-hak kemanusiaan manusia lainnya?

Bagaimana bisa kita lantang berkhotbah tentang "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" jika banyak atau komponen struktural dan politisi melakukan manipulasi politik lewat proses demokrasi; tidak mencerminkan sikap hikmat, bijaksana, dan sosok representasi yang akuntabel?

Kalau refleksinya dikembangkan: bagaimana pula bisa kita berbicara tentang "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sementara jumlah rakyat yang terjajah kemiskinan masih puluhan juta orang, sementara kehidupan serba materialistik, hedonistik, dan permisifistik kian merajalela dan mengabsolut?

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Kalau berdasarkan persentasenya, penduduk miskin di bulan Maret 10,14 persen, Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Sementara di desa mengalami penurunan 0,10 persen poin. Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per kapita per bulan. Garis kemiskinan pada bulan Maret ini naik dari Rp 458.947 di bulan September 2020. Penyumbang terbesarnya berada pada kategori GK makanan, dengan share sebesar 73,96 persen. Komoditas yang berpengaruh besar terhadap GK makanan adalah beras dengan kontribusi mencapai 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di pedesaan. Maka itu supaya pengeluaran masyarakat keluar dari garis kemiskinan, caranya adalah bagaimana mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin supaya GK tidak naik terlalu cepat. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 1,75 poin di bulan September 2020 menjadi 1,71 poin di bulan Maret 2021. Indeks kedalaman kemiskinan adalah indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa dalam kemiskinan yang dirasakan penduduk.<sup>15</sup>

Di tangan realitas sosial, selalu ada gugatan. Gugatan itu tidak sulit terbaca secara jernih senyatanya oleh elit kekuasaan dan komunitas cendekia bangsa ini, pasalnya problem besar dan berat masih mengeksaminasi dan bahkan menghegemoni kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia yang secara kriminogen sebagian berakar dari sepek terjangnya.

Jika kita mencermati dengan jernih, kita masih menjadi bangsa yang "kaya" dengan penyakit laten yang membuat citra Indonesia tetap layak disebut sebagai negara yang hanya mempunyai impian besar, tetapi mudah terganjal dalam mewujudkannya akibat tidak gigih dan konsisten dalam membukumkannya. Kondisi demikian inilah yang membuat kita hanya bisa "mabuk" impian, sementara dalam keseharian, khususnya elitnya, hanya sibuk memproduksi janji dan "mengeksplorasi" perbuatan palsunya.

---

<sup>15</sup> [BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021 Halaman all - Kompas.com](#)

Cita-cita menjadi bangsa besar sering sekali diucapkan elemen pemimpin yang berapi-api saat berpidato atau berjanji pada rakyat.<sup>16</sup> Saat berkampanye di hadapan konstituen misalnya, mereka seperti akan mengerahkan segala kemampuannya untuk "merias" bumi pertiwi ini dengan berbagai bentuk karya istimewa, yang bermanfaat bagi Indonesia ke depan.

Ketika disuruh menandatangani kontrak politik, mereka berani membubuhkan tanda tangan sebagai *syahadah* kekuasaan kalau dirinya kelak, saat terpilih menjadi elemen di pemerintahan atau pilar-pilar utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akan menciptakan zaman keemasan atau perubahan besar yang menandakan kejayaan dimana-mana.

Sayangnya, setelah terpilih dan disumpah atau bersumpah untuk mengamalkan Pancasila seperti janji setia menjaga amanat rakyat, ternyata janji ini diingkarinya. Mereka tergelincir menjatuhkan opsi jadi agen "terorisasi Pancasila". Mereka yang menempati pos strategis ini tergiur dan tergiring memasuki wilayah "permufakatan jahat" atau mempermainkan amanat sebagai penjaga keadilan dan pembumi kesejahteraan rakyat.

Jabatan yang dikendarainya bukan digunakan melindungi dan menyejahterakan rakyat, tetapi digunakan mendehumanisasikan atau menyuburkan "teror" terhadap rakyat. Rakyat tak ubahnya obyek eksperimentasi yang terus menerus dibodohi dan dijadikan tameng pembenaran eksaminatif sistematis berbagai model sepak terjang berpola penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Pancasila yang secara substansial menggariskan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat, sekedar dihafal dan digunakan oleh elemen strategis negara itu sebagai sekumpulan dalil apologis politis, dan bukan sebagai ruh moral-spiritual dalam kinerjanya.

Mereka itu merasa malu kalau harus mengimplementasikan Pancasila. Mereka juga dilanda ketakutan kehilangan investasi besar bagi keluarga, kolega, parpol, atau *neo-koncoisme*-nya, bilamana harus menegakkan doktrin keadilan, kebutuhanan, dan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>16</sup> Fais Mubarak, *Mencari Pancasila di Tengah Manusia Alpa*, (Jakarta: LPPI, 2017), h. 7.

*“Zamen bundeling van olle krachtern van de natie”*, yang bermaknakan “tekat bersama untuk mendahulukan kepentingan bersama, masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan sendiri”, adalah ungkapan Bung Karno di hadapan rakyat dan pejabat pemerintahan, yang dalam faktanya dieliminasi dimana-mana.<sup>17</sup>

Idealitasnya pesan Bung Karno itu mengajarkan, bahwa, dalam membangun bangsa, setiap orang yang dipercaya menduduki kursi yang membawa atribut atau identitar suara rakyat, haruslah mengutamakan komitmen kebangsaan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, membebaskan kemiskinan.

Mereka pun seharusnya berjuang melawan berbagai ancaman asing dan penyakit internal yang cenderung mengoyak republik menjadi sebuah negeri keropos, dan mensucikan diri sesuci-sucinya agar tidak terjerumus dalam kaukus dan kolaborasi *para bandit* berpola pembenaran korupsi, penodaan keadilan, pembodohan rakyat, atau berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Komunitas elit negara itu idealnya mampu jadi negarawan atau sosok elit yang bersikap cerdas dan humanitas seperti digariskan Pancasila dengan menunjukkan kapabilitas intelektual-spiritual, kemanusiaan, dan aseptabilitas moral-politiknya guna meninggikan hakikat makna tanggungjawab (kewajiban) kepada rakyat dan bukannya memilih jalan sebaliknya, yakni menjadikan rakyat sebagai kendaraan untuk memenuhi “birahi politik”-nya, kegilaan jabatan, dan nafsu kapitalistiknya semata.

Sayangnya, dewasa ini jalur “permufakatan jahat”, kompromi keji, atau kemenangan cara mempermainkan amanat masalah yang ditempuh atau dijadikan opsi menggiurkan sebagian elemen negeri ini. Mereka terbius dalam jargon dan kesempatan berlabel senyampang kebebasan atau kemerdekaan berucap dan berbuat bisa ditunjukkan semaunya, yang mengesakan kalau dalam kehidupan berbangsa ini tidak perlu kendali atau bisa menelanjangi ideologi sesuka hati.

Mereka itu masih membentuk atau mengemas dirinya sebagai oportunist yang gemar menciptakan peluang-peluang strategis yang membuatnya jadi selebriti kekuasaan kaya-raya atau menempati strata elitisme yang dikenal “*upper class*”, yang membuat rakyat jadi penonton yang merana. Rakyat memang jadi “merdeka belajar”, namun belajarnya adalah melihat, menelaah, dan barangkali meniru cara-cara yang berlawanan dengan garis ideologis.

---

<sup>17</sup> Ibid.

Kroni dan kepentingan eksklusif kaukus politik dan ekonomi berafiliasi dinasti misalnya dijadikan sebagai "kepentingan keluarga kontemporer" yang diabsolutkannya dengan mengalahkan amanat kerakyatan. Amanat rakyat telah dijadikannya sebagai obyek permainan utama dengan berbagai dalih yang sebenarnya membodohi masyarakat (publik). Kalau kaukus demikian tidak dihentikan sendiri oleh elit strategis bangsa dengan cara memenangkan doktrin Pancasila, maka kehancuran total negeri ini hanya menunggu waktu.

## Penutup

Pancasila secara general dan verbal memang menjadi ideologi yang sangat dicintai dan dibela, namun dalam ranah empirik, ideologi ini belum dijadikan kekuatan untuk membangun dan mewujudkan jiwa yang kuat. Kesadaran kolektif sebagai bangsa yang mempunyai ideologi Pancasila wajib dibuktikan ke ranah *das sein*, sehingga karut marutnya bangsa ini tidak menuju lonceng kematian bernegara, tetapi menuju pembaruan atau perubahan radikal.

Sejatinya, kesadaran kolektif itu pun akan mampu mengalahkan berbagai bentuk penyakit anomali, deviasi, malversasi, dan kleptokrasi kekuasaan, atau berbagai jenis virus yang menghambat dan menjegal aksi-aksi moral edukatif yang mencerdaskan setiap bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Tri Soegiti, dkk, *Pendidikan Pancasila*, Semarang: Unnes Press, 2016.  
Mubarak, *Mencari Pancasila di Tengah Manusia Alpa*, Jakarta: LPPI, 2017  
Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997).  
Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKN*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018,  
Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi, *Membangun Hukum Hukum Berdasar Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014,

## Internet

[BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021 Halaman all - Kompas.com](#)